

## Pendampingan Aplikasi Smart Government dalam Ekosistem Desa Digital Terintegrasi di Desa Ambulu, Cirebon

Ilona Vicenovie Oisina Situmeang \*, Woro Harkandi Kencana, Meisyanti, Khina Januar Rahmawati, Herlin Setio Nugroho, Adiella Yankie Lubis

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia YAI, Indonesia

Email : [ilonaoisina@yahoo.com](mailto:ilonaoisina@yahoo.com)

### Article Info

Submitted: 8 November 2022

Revised: 25 January 2023

Accepted: 1 May 2023

Published: 15 July 2023

**Keywords:** smart government, Digital Village, Digital Platform, ambulu

### Abstract

*Sustainable village development is currently supported by the development of information technology which continues to increase in realizing an integrated digital village ecosystem. This community service activity is carried out with partners PT Jekom which is a Smart Government application development company as a digital community service platform. The problem faced by Ambulu Village is that the village community has not been optimal in using this application. These obstacles are due to the lack of knowledge of the Ambulu people and socialization regarding the existence and use of the Smart Government application. As well as not maximally utilizing the features contained in the application. Activities are carried out using survey methods, in-depth interviews and FGDs, then action & communication stages through outreach and assistance to the local government and Ambulu Village community, as well as evaluation of the results of activities. As a result of this activity, the Ambulu village community gained knowledge about the integrated digital village ecosystem and the benefits of using the Smart Government application. There is an increase in the use of the application and from the constraints on the use of this application it becomes a recommendation for the village government and PT. Jekom partners in developing applications and using applications that are effective and efficient in realizing an integrated digital village ecosystem.*

### Abstrak

Pembangunan desa berkelanjutan saat ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang terus meningkat dalam mewujudkan ekosistem desa digital yang terintegrasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mitra PT Jekom yang merupakan perusahaan pengembangan aplikasi Smart Government sebagai *platform* digital layanan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Ambulu adalah Masyarakat desa belum optimal dalam penggunaan aplikasi ini. Kendala tersebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat Ambulu serta sosialisasi mengenai keberadaan dan penggunaan aplikasi Smart Government. Serta belum maksimalnya aparat desa memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Kegiatan dilakukan dengan melakukan metode survei, wawancara mendalam, dan FGD, kemudian tahapan *action & communication* melalui sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah serta masyarakat Desa Ambulu, serta evaluasi terhadap hasil kegiatan. Hasil dari kegiatan ini masyarakat Desa Ambulu mendapatkan pengetahuan tentang ekosistem desa digital terintegrasi dan manfaat penggunaan aplikasi Smart Government. Terdapat peningkatan penggunaan aplikasi dan dari kendala penggunaan aplikasi ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah desa maupun mitra PT. Jekom dalam pengembangan aplikasi dan penggunaan aplikasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan ekosistem desa digital yang terintegrasi

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa berkelanjutan saat ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang terus meningkat. Program desa digital sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengembangan inovasi digital telah merambah pada instansi pemerintah yang paling kecil yaitu instansi pemerintah desa, sehingga pengembangan inovasi digital bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah saja (provinsi dan kabupaten/kota) (Eprilianto et al., 2020). Sehingga saat ini desa-desa di Indonesia telah melakukan aktivitas layanan publik menggunakan *platform* digital yang membantu aktivitas sehari-hari mereka. Desa yang telah memanfaatkan pengembangan desa menggunakan *platform* digital ini disebut dengan desa digital (Suyatna et al., 2019). Desa digital merupakan ruang sosial berjejaring *online* untuk mengonfigurasi ulang strategi kelangsungan ekonomi, layanan publik, dan politik dalam jangka waktu ke depan (Faxon, 2022). Desa digital adalah konsep pengembangan pemerintah desa dan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan melalui teknologi informatika, dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya. Desa digital adalah kawasan desa yang menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat melalui komputer terhubung ke internet, ponsel pintar, printer, tablet, laptop dan, infrastruktur komunikasi lainnya. Layanan yang ada di desa digital antara lain *e-commerce*, *e-government*, perbankan, *e-learning*, serta layanan komunikasi dan informasi (Rusdan, 2019).

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Persada Indonesia YAI bermitra dengan PT. Jejaring Emas Komunikasi (Jekom) yang berlokasi di Jakarta, perusahaan yang berkecimpung dalam bidang aplikasi pemerintahan. Mitra berfokus pada pembuatan program sistem informasi pemerintahan dan penerapan *Smart City* di Indonesia. Telah membangun *Enterprise Resource Planning* (ERP) khusus untuk sistem informasi pemerintahan seiring dan sejalan dengan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Yuhfizar et al., 2019), yang terintegrasi satu data. Sistem ini disebut *platform* Smart Government sebuah sistem yang terintegrasi dalam satu data yang mengintegrasikan pemerintah, pelaku usaha swasta dan masyarakat dalam aplikasi khusus di setiap pemerintahan kabupaten dan kota juga menghubungkan dengan ekosistem aplikasi baik di kementerian atau pemerintah pusat, antar kabupaten dan kota dan antar desa (Ramadhannisa et al., 2022). Bisa bertukar informasi, berbagi data, dan kolaborasi dalam satu layanan.

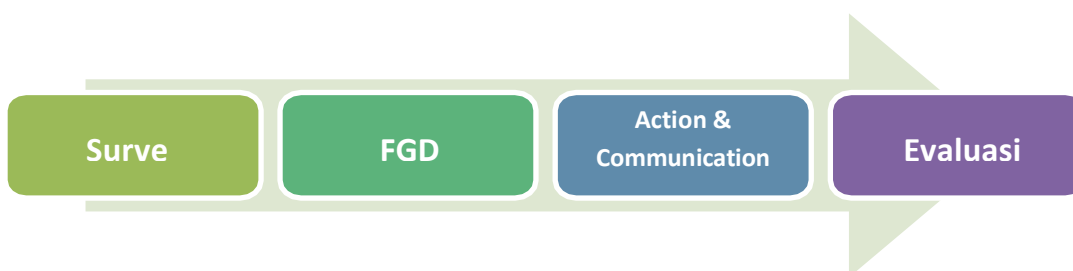
Desa Ambulu, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu mitra PT. Jekom dalam menggunakan aplikasi yang bernama Smart Government. Desa Ambulu merupakan desa yang berada di lingkungan Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Yang termasuk desa pesisir dengan penduduk desa hampir 70% berpenghasilan dari hasil perikanan. Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Ambulu bisa digunakan sebagai lahan tempat tinggal atau perumahan hanya sedikit saja yang digunakan untuk perkebunan, namun mayoritas daerahnya merupakan area tambak. Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon memiliki luas area pemukiman 54.045 ha/m<sup>2</sup>. Dengan luas area tersebut terbagi kedalam 5 dusun, yakni Dusun Kliwon, 41 Manis, Pahing, Pon, dan Wage. Serta dibagi kedalam 6 RW dan 30 RT. Jadi masing-masing RW memiliki 5 RT. Letak Desa Ambulu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta tidak jauh dari jalan Tol Kanci-Pajagan, pembangunan desa dan peningkatan ekonominya sangat pesat (Rohiani et al., 2021). Desa Ambulu telah menggunakan aplikasi Smart Government yang merupakan aplikasi terintegrasi dalam layanan pemerintahan desa, perekonomian, keamanan hingga kesehatan. Saat ini pemanfaatan aplikasi hanya pada layanan administrasi publik. Selama periode Maret-Agustus tahun 2022 tercatat sudah 2.780 arsip dokumen surat dan data yang diproduksi secara daring melalui aplikasi Smart Government. Pemanfaatan layanan publik secara digital antara lain penghematan kertas, tidak adanya pungutan liar, menghemat biaya transportasi masyarakat untuk datang ke balai desa, memperlancar proses pelayanan, transparansi dan keterbukaan informasi. Permasalahan pada pengabdian masyarakat ini adalah penggunaan aplikasi ini lebih aktif digunakan oleh perangkat desa. Sedangkan masyarakat masih belum banyak memanfaatkan aplikasi, hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat Ambulu serta sosialisasi mengenai keberadaan dan penggunaan aplikasi Smart Government. Serta belum maksimalnya aparat desa memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi tersebut.

## 2. METODE

Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini terdapat beberapa tahap seperti yang disajikan pada Gambar 1, antara lain:

- a) Pada awal tahapan, tim pelaksana akan melakukan survei untuk mendapatkan *segmentasi*, *targeting*, dan *positioning* dari program yang akan dilakukan. Audiensi dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Kepala Desa Ambulu dan aparat desa.

- b) Tahapan lanjutan setelah survei menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dengan masyarakat dan aparat Desa Ambulu, Kabupaten Cirebon. Masyarakat desa merupakan *opinion leader* antara lain: Ketua RT dan RW, Ketua Karang Taruna, Ketua PKK, UMKM, MUI Desa Ambulu. Pelaksanaan FGD dilakukan di kantor Kepala Desa Ambulu yang juga sebagai Balai Desa Ambulu. Penyusunan rencana didasarkan pada hasil dari FGD dan hasil *one person one voice*. FGD merupakan diskusi kelompok yang terdiri dari delapan sampai dengan dua belas peserta dengan bimbingan dari seorang fasilitator yang membahas topik tertentu di antara peserta. Sebuah kelompok fokus bukanlah wawancara kelompok; kelompok fokus berhasil ketika peserta dapat berbicara satu sama lain tentang topik. Selain itu, memberikan kesempatan untuk berbagi dan membuat perbandingan tentang pengalaman, ide dan pandangan peserta serta memberikan kesempatan untuk membicarakan sesuatu yang efektif dalam memberikan informasi. Namun, keahlian fasilitator sangat penting untuk merangsang dan mendukung diskusi tetapi tidak dapat bertindak sebagai ahli dalam topik tersebut (Omar, 2018).  
Dalam perencanaan ini tim pelaksana, mahasiswa, dan mitra akan berdiskusi untuk mendapatkan konsep kegiatan pendampingan dan sosialisasi agar masyarakat dapat mengaplikasikan *platform* yang telah terintegrasi di ekosistem desa digital.
- c) Pada tahap *action and communication* (tindakan dan komunikasi) akan dilaksanakan dengan pendekatan Penta Helix yaitu akademisi (insan dikti), pelaku usaha (mitra, masyarakat atau komunitas, *opinion leader*, dan lain- lain), pemerintah (pemprov, pemkab, kecamatan) dan media (koran) (Sudiana et al., 2020). Tahap ini dilakukan dengan dua tahap yaitu, tahap pertama dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Ambulu di Kabupaten Cirebon. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk penyampaian materi melalui modul terkait dengan *platform* terintegrasi yang sudah dipersiapkan oleh tim pelaksana, mahasiswa, dan mitra. Penyampaian materi dilakukan oleh salah satu tim pelaksana dan mitra pembuat *platform*. Tahap kedua berupa pendampingan dalam bentuk pelatihan mengenai *platform* yang terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengaplikasikan *platform* tersebut. Pelatihan dilakukan dengan cara langsung menggunakan *platform* tersebut. Saat masyarakat melakukan pelatihan tersebut, tim pelaksana dan mitra dapat sekaligus mengevaluasi tahapan *action* dan *communication*.
- d) Evaluasi dilakukan untuk menilai dari setiap tahapan yang dilakukan baik dari kegiatan, perencanaan, Tindakan, dan komunikasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat kekuatan program dan kelemahan program.



Gambar 1. Bagan prosedur kerja

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini sudah banyak aplikasi sistem informasi pembangunan pedesaan yang dikembangkan baik oleh pemerintah maupun organisasi nonprofit. Terdapat empat aplikasi yang telah diperkenalkan kepada masyarakat, yaitu: (1) Profil Desa dan Kecamatan; (2) Sistem Informasi Desa (SID); (3) Mitra Desa; dan (4) Sistem Informasi dan Administrasi Perdesaan. Selain keempatnya, sebenarnya masih banyak aplikasi lain (Fariah, 2020). Aplikasi Smart Government yang digunakan oleh Desa Ambulu merupakan sistem informasi yang terintegrasi dalam sebuah ekosistem desa digital. Sehingga diharapkan tidak banyak aplikasi yang harus digunakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Penggunaan aplikasi ini tersebut masih mengalami beberapa kendala. Sehingga kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Ambulu.

Tahapan awal yang dilakukan pada kegiatan masyarakat ini adalah survei. Survei dilakukan oleh tim Abdimas dengan melakukan kunjungan awal ke Desa Ambulu, Kabupaten Sumedang. Desa Ambulu merupakan desa yang telah menggunakan aplikasi Smart Government sejak tahun 2021. Tim melakukan survei dengan audiensi dengan Kepala Desa Ambulu Bapak Sunaji beserta jajaran staf pemerintahan desa. Dalam tahapan ini ditemukan permasalahan awal dalam penggunaan aplikasi Smart Government sebagai bentuk implementasi desa digital. Desa digital merupakan program untuk menjadikan desa sebagai wilayah pembangunan yang memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi yang memadai. Terdapat unsur penting di dalam konsep desa

digital tersebut, yaitu: pemberdayaan masyarakat desa, dan teknologi informasi (Wijaya et al., 2013). Desa digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses, dan pelayanan informasi. Penerapan desa digital tersebut disebutkan dalam UU pasal 86 ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan (Hasya et al., 2020).

Setelah tahapan survei dilakukan, tim mengadakan FGD dengan masyarakat dan aparat desa pada tanggal 26 Agustus 2022. Penggunaan FGD pada pengabdian masyarakat untuk menghasilkan diskusi atau debat tentang topik yang membutuhkan pandangan kolektif dan makna yang ada di balik pandangan tersebut (termasuk pengalaman dan keyakinan mereka) (Nyumba et al., 2018). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dari pemuka agama, ketua RT dan RW, pemuda karang taruna, UMKM, ibu PKK serta DisKominfo Kabupaten Cirebon. Dalam FGD tim dan masyarakat berdiskusi tentang penggunaan aplikasi *platform* digital masyarakat desa khususnya Smart Government. Dari hasil FGD didapatkan permasalahan dari aparat desa antara lain: pemanfaatan aplikasi hanya sebesar 15%. Menu dan fitur yang belum dimanfaatkan pada aplikasi ini yaitu: pengaduan masyarakat, ambulans, kepolisian, damkar, masjid, survei dan validasi serta verifikasi arsip dan dokumentasi, *database*/bank data, UKM dan usaha, *e-Commerce*, PPOB, potensi dan berita desa, dan perpajakan. Rendahnya pemanfaatan karena belum terwujud integrasi dengan Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Dinas Sosial, dan Dinas Kominfo.

Meskipun Pemerintah desa telah menggunakan aplikasi Smart Government, masyarakat tetap datang ke balai desa untuk layanan publik. Kemudahan melakukan layanan publik kapan dan di mana saja belum terwujud. Masih banyak masyarakat yang belum *download* aplikasi. Selain rendahnya literasi media, ketidakpercayaan masyarakat dalam penggunaan aplikasi tersebut masih tinggi, terutama dalam keamanan data. Sehingga saat ini hanya aparat desa yang menggunakan aplikasi ini dalam pendataan masyarakat dan layanan publik antara lain penerbitan Surat Keterangan (SK) Usaha, SK belum pernah menikah, SK Wali, SK Kehilangan, SK tempat tinggal (domisili), SK status perkawinan, SK tidak mampu/ekonomi lemah, SK penghasilan, dan SK izin keramaian.

Sedangkan terkait kendala sertifikasi tanda tangan elektronik, hambatannya adalah belum ada server untuk di tempatkan di Dinas Kominfo yang harus di beli oleh desa, Karena syarat mendapatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) harus ada kerja sama desa dengan Dinas Kominfo dan ada server dan aplikasi yang di tempatkan pada data center Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon.



Gambar 2. FGD Desa Ambulu bersama PT. Jekom dan Tim Abdimas

Tahapan selanjutnya adalah *action & communication*, setelah melakukan FGD dan mendapatkan permasalahan dalam penggunaan *platform* digital Smart Government, kemudian dilakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi dilakukan karena penggunaan aplikasi Smart Government merupakan kebijakan Pemerintah Desa Ambulu dalam pengembangannya. Sosialisasi dalam konteks kebijakan publik diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (*target grup*) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut (Herdiana, 2018)

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 8 September 2022 di Balai Desa Ambulu. Kegiatan sosialisasi di Desa Ambulu dibuka oleh Kepala Desa Ambulu, Sunaji. Kegiatan ini dihadiri oleh 31 Peserta. Peserta merupakan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Ambulu. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara tatap muka langsung dan *video conference zoom*. Adapun Pembicara *onsite* dalam kegiatan sosialisasi ini, antara lain: Bayu EkaLesmana, S.IP, M.Tr. I.P. dari Perwakilan PT. Inti Konten Indonesia, Raditya dari Dinas Kominfo, Arfan Mantemas Direktur PT Jejaring Emas Komunikasi yang menjadi mitra dalam kegiatan ini serta tim dosen pengabdian masyarakat, sedangkan pembicara yang menyampaikan secara *online* adalah Andreyanto Pratama dari Perwakilan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Mahasiswa turut terlibat sebagai pendamping masyarakat dalam penggunaan aplikasi Smart Government. Dokumentasi kegiatan sosialisasi seperti terlihat pada gambar 3.





Gambar 3. Pembicara menyampaikan materi pada acara sosialisasi

Materi yang disajikan pada sosialisasi ini antara lain: Implementasi *smart village* yang sebagai perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e government* yang dijelaskan oleh dinas Kominfo Cirebon. Pemanfaatan aplikasi Smart Government oleh PT. Jekom dan PT. Inti Konten Indonesia. Mitra pengembang aplikasi ini menjelaskan fitur-fitur lain yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Desa Ambulu. Melihat dari hasil FGD Desa Ambulu tentang kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pada aplikasi ini, Andreyanto Pratama dari Perwakilan BSSN (Badan Siber Sandi Negara) dihadirkan untuk memberikan materi tentang sistem keamanan aplikasi.

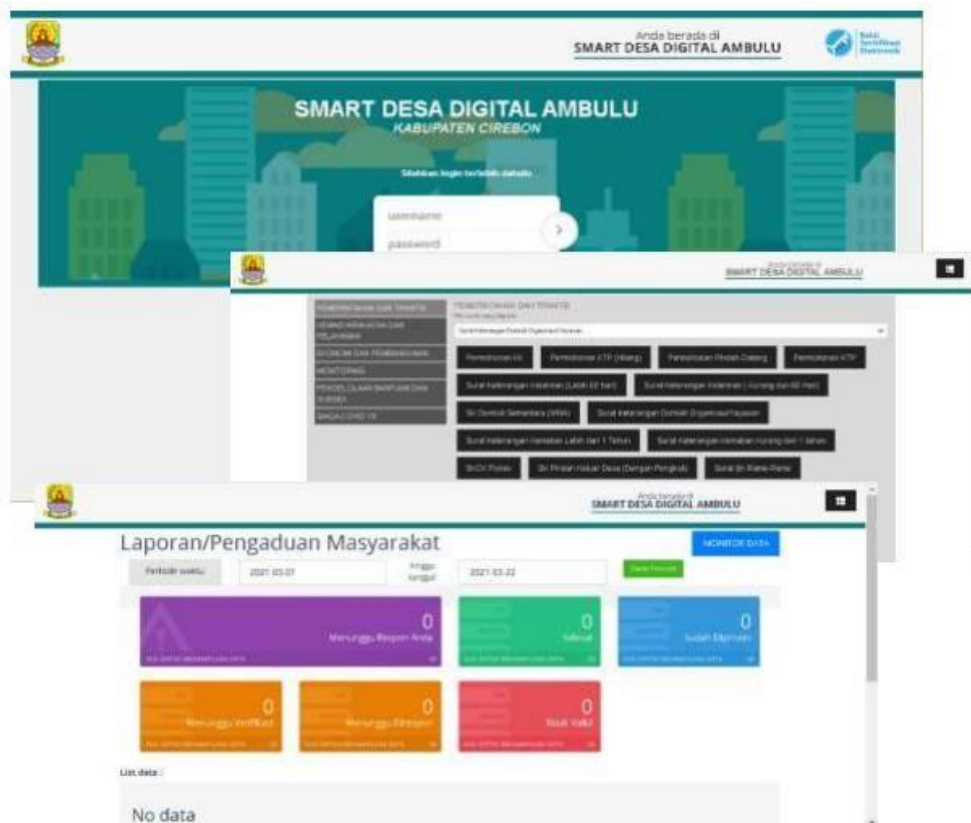
Setelah pembicara memberikan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan masyarakat serta aparat desa. Pembahasan diskusi tentang integrasi ekosistem desa digital dan pemanfaatan aplikasi Smart Government. Peserta dan pembicara aktif dalam melakukan kegiatan ini. Pengembang mitra menjawab permasalahan selama tanya jawab dengan masyarakat Desa Ambulu maupun aparat desa. Pertanyaan dari masyarakat mengenai kendala yang mereka alami dalam penggunaan aplikasi Smart Government. Literasi digital masyarakat yang masih menjadi kendala sehingga meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi banyak masyarakat yang belum menggunakan bahkan pemasangan aplikasi tersebut. Selain pertanyaan ada masyarakat Ambulu yang memberikan pernyataan tentang manfaat penggunaan aplikasi ini. Bahwa meskipun warga bepergian ke kota lain, tetapi masih bisa melakukan pelayanan administrasi desa tanpa harus mengurusnya dengan pulang kembali ke Desa Ambulu. Diskusi antar warga ini juga memberikan informasi langsung ke masyarakat tentang pemanfaatan aplikasi.

Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi. Pendampingan dalam penggunaan aplikasi ini dilakukan juga oleh 5 mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya tim pun telah mendapatkan pelatih dari mitra PT. Jekom. Sehingga mahasiswa dan tim dosen telah memahami penggunaan aplikasi Smart Government. Tim membantu masyarakat dalam melakukan penginstalan aplikasi hingga penggunaan fitur-fitur yang ada. Saat ini penggunaan aplikasi hanya pada sistem Android dan website. Permasalahan masyarakat meskipun pemerintah desa sudah menggunakan aplikasi ini tetapi banyak masyarakat yang belum mengunduh aplikasi, mereka masih terbiasa untuk datang langsung ke kantor desa. Kemudian pemerintah desa menggunakan Smart Government untuk layanan administrasi. Dan bentuk surat dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp sebagai bentuk *soft copy*, tetapi bentuk *hard copy* masih digunakan sebagai berkas warga. Karena meskipun pemerintah desa menggunakan aplikasi, kelanjutan proses administrasi di tingkat daerah masih membutuhkan bentuk tanda tangan basah dan *print out*.

Melalui pendampingan ini, masyarakat yang telah memasang aplikasi di *handphone* mereka, langsung mencoba fitur-fitur layanan khususnya layanan administrasi. Saat mereka sudah memahami cara penggunaan aplikasi tersebut. Mereka menyadari bahwa aplikasi ini mempermudah layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor desa. Gambar 4 merupakan tampilan aplikasi *mobile* yang diinstal oleh peserta kegiatan.



Gambar 4. Tampilan aplikasi *mobile*



Gambar 5. Tampilan *website* Smart Government

Gambar 5 merupakan tampilan *website* smart government. Pendampingan juga dilakukan dalam proses penggunaan *KTP reader* sebagai input data ke dalam aplikasi seperti terlihat di gambar 6. *KTP reader* dimiliki oleh aparat desa untuk membaca data *KTP* sebagai data input masyarakat ke dalam sistem Smart Government. E-*KTP* sendiri sebenarnya memiliki chip berisi data diri pengguna yang dirancang agar bisa bertukar data secara elektronik (Hais & Jambi, 2021). Beberapa kendala dalam sistem antara lain data yang tidak sama dengan data *KTP reader* dengan sistem desa. Sehingga proses selanjutnya masyarakat akan membuat keluhan dalam sistem untuk nantinya divalidasi oleh aparat desa dan segera dilakukan perbaikan. Setelah pendampingan dilakukan, tim melakukan evaluasi kepada peserta melalui tanya jawab dan pengisian Google Form. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi dan pendampingan yang telah dilakukan oleh tim abdimas dan mitra. Hasil evaluasi menjadi masukan bagi pengembangan sistem aplikasi Smart Government.

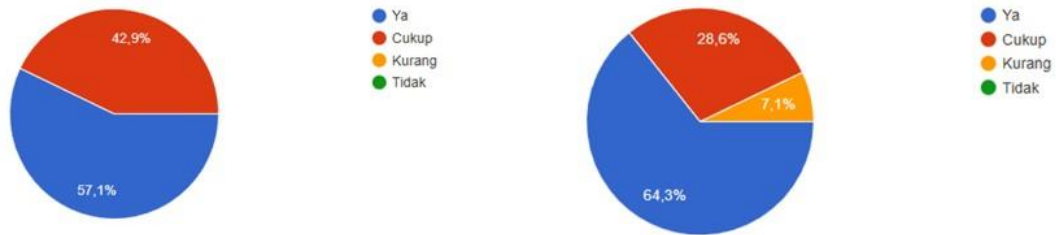


Gambar 6. Pendampingan penggunaan aplikasi Smart Government dan *KTP Reader*

Hasil evaluasi kegiatan sosialisasi dan pendampingan *platform* terintegrasi ekosistem desa digital ini dalam penggunaan aplikasi Smart Government pada peserta kegiatan adalah sebagai berikut: sebanyak 57,1 % peserta memahami materi yang disajikan sedangkan 42,9% cukup memahami materi. Peningkatan manfaat peserta terhadap pengetahuan ekosistem desa digital terintegrasi sebesar 64,3%, 28,6% merasa cukup dan kurang memberikan manfaat sebesar 7,1%.

Apakah anda sudah memahami materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan Platform Terintegrasi Ekosistem Desa Digital?

Apakah sosialisasi dan pelatihan ini memberikan manfaat pada pengetahuan anda mengenai ekosistem desa digital yang terintegrasi?



Gambar 7. Hasil evaluasi kegiatan

Dari hasil kegiatan ini juga terjadi peningkatan masyarakat yang telah memasang aplikasi sebanyak 92.9% dan 7.1 % yang belum menginstall aplikasi. Saat kegiatan FGD masyarakat yang telah menginstall aplikasi hanya 2 orang. Sedangkan masyarakat tidak mengalami kendala dalam proses penginstalan aplikasi sebesar 85.7%. Sedangkan kendala dalam penggunaan aplikasi ini dimasyarakat antara lain: jaringan internet, masih banyak fitur yang belum berjalan, dan proses yang lama dalam validasi layanan administrasi. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan masyarakat Desa Ambulu dengan adanya sosialisasi dan pendampingan ini mendapatkan pengetahuan dan manfaat dalam penggunaan aplikasi Smart Government. Peningkatan masyarakat yang telah menginstall dan menggunakan aplikasi ini meningkat sehingga akan memudahkan masyarakat dalam penggunaan layanan administrasi pemerintahan. Hasil dari kegiatan ini menjadi rekomendasi kepada pemerintah desa bahwa masyarakat pun ingin memanfaatkan fitur-fitur lain yang belum berjalan maksimal contohnya fitur pengaduan masyarakat dan terkait perekonomian desa.

#### 4. SIMPULAN

Kegiatan Abdimas sosialisasi dan pendampingan aplikasi Smart Government pada masyarakat Desa Ambulu Kabupaten Cirebon merupakan implementasi pada ekosistem desa digital yang terintegrasi. Pembangunan desa yang berkelanjutan saat ini berjalan seiring berkembang teknologi informasi. Desa digital akan mempermudah pelaksanaan kegiatan masyarakat desa dalam layanan administrasi publik yaitu penerbitan Surat Keterangan (SK) usaha, SK belum pernah menikah, SK Wali, SK Kehilangan, SK tempat tinggal (domisili), SK status perkawinan, SK tidak mampu/ekonomi lemah, SK penghasilan, dan SK izin keramaian. Kegiatan perekonomian dalam izin usaha semakin terbantu serta data-data kesehatan Posyandu bisa tersaji dalam aplikasi. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Ambulu khususnya dalam peningkatan pengetahuan dan penggunaan aplikasi Smart Government. Kendala-kendala teknis dan non teknis penggunaan aplikasi ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemerintah desa dan pengembang aplikasi. Pendampingan kepada masyarakat dalam penggunaan aplikasi ini pun diharapkan secara rutin dilakukan, sehingga pelaksanaan ekosistem desa digital bisa secara maksimal terwujud.

#### 5. PERSANTUNAN

Ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI yang telah mendanai kegiatan ini dengan Hibah Progam Matching Fund "Kedaireka" tahun 2022. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa Ambulu, Kabupaten Cirebon yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung kegiatan PKM ini. Terima kasih juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta yang telah mendukung kegiatan ini.

#### REFERENSI

- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Yuyun Eka Kartika Sari, D. (2020). Digital Inovasi Sektor Publik: Efektivitas Kolaborasi dalam Implementasi Inovasi Dega Digital. *Jurnal El-Riyasah*, 10(2), 127-145. <https://doi.org/10.24014/JEL.V10I2.8909>
- Fariah, A. (2020). Optimization of Production Programs Towards a Digital Based Village. *Devotion Journal of Community Service*, 1(2), 75-83. <http://devotion.greenvest.co.id>
- Faxon, H. O. (2022). Welcome to the Digital Village: Networking Geographies of Agrarian Change. <https://doi.org/10.1080/24694452.2022.2044752>

- Hais, Y. R., & Jambi, U. (2021). Implementasi Sistem Ekstraksi dan Validasi Data E-Ktp Sebagai Solusi Alternatif Otomatisasi Sistem Administrasi Data untuk Organisasi Kecil Non-Pemerintah. In *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) 2021* (Issue 2012, pp. 46–54).
- Hasya, S., Wikusna, W., Kom, M., & Gunawan, T. (2020). Aplikasi Berbasis Web Desa DigitalBandung Juara pada Modul Pengaduan Warga. In *e-Proceeding of Applied Science ISSN:2442-5826*.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar Abstrak. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26.
- O.Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of Focus Group Discussion Methodology: Insights from Two Decades of Application in Conservation. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860>
- Omar, D. (2018). Focus Group Discussion in Built Environment Qualitative Research Practice. *IOPConference Series: Earth and Environmental Science*, 117(1), 012050. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/117/1/012050>
- Ramadhannisa, R. T., Indrawan, R., Situmeang, I. V. O., Kencana, W. H., Meisyanti, & Rahmawati, K. J. (2022). Sosialisasi Aplikasi Smart Government pada Masyarakat Desa Rawa Urip, Kabupaten Cirebon. *IKRA-ITH ABDIMAS* 5(3), 186–191.
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 5(1), 15-27. <https://doi.org/10.29244/IP2WD.2021.5.1.15-27>
- Rusdan, M. (2019). Design of Wireless Network System for Digital Village Using Wireless Distribution System. *Journal of Informatics Information System Software Engineering andApplications (INISTA)*, 1(2), 51–59. <https://doi.org/10.20895/INISTA.V1I2.66>
- Sudiana, K., Sule, E. T., Soemaryani, I., & Yunizar, Y. (2020). The Development and Validation of the Penta Helix construct. *Verslas: Teorija Ir Praktika / Business: Theory and Practice*, 21(1), 136–145. <https://doi.org/10.3846/BTP.2020.11231>
- Suyatna, R., Madya, W. A.(2019). Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Lingkar Widaiwara, Januari*, 1, 22–26.
- Wijaya, E., Anggraeni, R., & Bachri, D. R. (2013a). Desa Digital: Peluang untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 75–88. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2013.13.1.158>
- Yuhefizar, Sanjani, H., & Chadri, R. (2019). Penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (E-Government) dengan Pendekatan Bottom-Up berbasis Web di Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Nasional USM*, 2(1), 303–309. <https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/1712>